



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI PRIHANTARA
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 89482

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.450.000.000

1. Tanah Seluas 341 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN RIAU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 750 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m²/258 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
6. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.800.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



4.	MOTOR, VESPA VSP S IGET 150 ABSA/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp. 40.000.000
5.	MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI	Rp. 15.000.000
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 125.850.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp. ---
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 1.360.686.987
F.	HARTA LAINNYA	Rp. ---
Sub Total		Rp. 4.073.336.987
III. HUTANG		Rp. ---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 4.073.336.987

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.